

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003). Ketimpangan pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara kelompok yang berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah. Semakin besar perbedaan pendapatan semakin besar pula variasi dalam ketimpangan pendapatan. Jika ketimpangan terus terjadi antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah, maka perekonomian dapat dikatakan tidak merata. Permasalahan yang sering muncul dan yang sering terjadi di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Indikator yang sering dijadikan tolak ukur dalam melihat ketimpangan adalah pendapatan perkapita masyarakatnya. Masyarakat dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan lebih mudah aksesnya dalam segala hal, misalnya keinginan memiliki harta, tidak ada keterbatasan dalam hal mengkonsumsi dan lain sebagainya, akan tetapi jika pendapatan perkapitanya rendah maka akses pun akan menjadi terhambat seperti keterbatasan dalam memiliki harta, jumlah konsumsi yang rendah, pendidikan dan kesehatan juga kurang terjamin (Matondang, 2018)

Ketimpangan pendapatan bisa terjadi sesama individu, sektor maupun daerah.

Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumberdaya yang ada dan karakteristik setiap daerah. Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antara masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah (Irawan, 2015).

Tabel 1.1
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan 19 Kabupaten/Kota
Di Sumatera Barat (Indeks)

Kab/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat	0.321	0.306	0.305	0.306	0.300
Kab.Kep.Mentawai	0.306	0.336	0.273	0.321	0.233
Kab.Pesisir Selatan	0.255	0.246	0.264	0.253	0.246
Kab.Solok	0.303	0.285	0.277	0.246	0.243
Kab.Sijunjung	0.300	0.293	0.269	0.270	0.243
Kab.Tanah Datar	0.288	0.278	0.273	0.250	0.251
Kab.Padang Pariaman	0.296	0.297	0.257	0.269	0.245
Kab.Agam	0.257	0.251	0.278	0.272	0.298
Kab.Lima Puluh Kota	0.283	0.238	0.222	0.244	0.208
Kab.Pasaman	0.266	0.330	0.310	0.248	0.230
Kab.Solok Selatan	0.309	0.295	0.307	0.277	0.253
Kab.Dharmasraya	0.264	0.278	0.280	0.268	0.287
Kab.Pasaman Barat	0.290	0.283	0.258	0.261	0.277
Kota Padang	0.344	0.312	0.312	0.343	0.354
Kota Solok	0.296	0.271	0.286	0.277	0.288
Kota Sawahlunto	0.310	0.289	0.300	0.295	0.314
Kota Padang Panjang	0.290	0.322	0.394	0.306	0.296
Kota Bukittinggi	0.337	0.267	0.265	0.286	0.317
Kota Payakumbuh	0.302	0.276	0.325	0.316	0.311
Kota Pariaman	0.316	0.300	0.310	0.301	0.272

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Pada table 1.1 diatas menunjukkan perkembangan ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Pesisir Selatan sebesar 0,255 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 0,344. Pada tahun 2019 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,246 paling tinggi adalah Kabupaten Mentawai sebesar 0,336. Lalu pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,222 paling tinggi adalah Kota Padang Panjang sebesar 0,394. Selanjutnya pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kabupaten Solok sebesar 0,246 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 0,343. Selanjutnya pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 0,233 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 0,354.

Ketimpangan pendapatan di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, PDRB didefinisikan menjadi peningkatan standar material kehidupan bermasyarakat terutama melalui besar yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan total jasa serta barang yang diproduksi, secara langsung diikuti oleh peningkatan total penduduk serta perbaikan dan pengembangan teknologi, yang menyebabkan perubahan pendapatan di masyarakat atau suatu kawasan (BPS Sumbar, 2022). Hal ini terlihat dari perkembangan produk domestic regional bruto di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat dibawah ini:

Tabel 1.2
Produk Domestik Bruto Regional
19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Persen)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	4.89	4.73	-1.85	2.88	4.94
Kab. Pesisir Selatan	5.32	4.78	-1.11	3.37	4.02
Kab. Solok	5.19	5.04	-1.14	3.31	4.31
Kab. Sijunjung	5.07	4.81	-1.1	3.15	3.95
Kab. Tanah Datar	5.04	4.99	-1.12	3.3	4.2
Kab. Padang Pariaman	5.44	2.4	-10.46	2.18	6.87
Kab. Agam	5.23	4.78	-1.37	3.7	4.21
Kab. Lima Puluh Kota	5.23	5.06	-1.16	3.33	4.04
Kab. Pasaman	4.97	4.8	-0.87	3.39	4.09
Kab. Solok Selatan	5	4.86	-1.24	3.35	4.02
Kab. Dharmasraya	5.28	4.94	-1.39	3.42	4.28
Kab. Pasaman Barat	5.21	4.45	-1.34	3.75	4.17
Kota Padang	6.06	5.64	-1.86	3.66	4.33
Kota Solok	5.65	5.49	-1.42	3.56	4.6
Kota Sawahlunto	5.5	5.31	-1.27	2.49	3.98
Kota Padang Panjang	5.71	5.56	-1.44	3.46	4.39
Kota Bukittinggi	6	5.84	-1.74	3.61	4.68
Kota Payakumbuh	6.02	5.89	-1.65	3.59	4.52
Kota Pariaman	6.02	5.90	-1.65	3.59	4.52
Provinsi Sumatera Barat	5.14	5.01	-1.61	3.29	4.36

Sumber : Badan Pusat Statitisk 2023

Pada table 1.2 diatas menunjukkan perkembangan produk domestik regionalbruto di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 produk domestic bruto paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 4,89% paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 6,06%. Pada tahun 2019 produk domestic brutopaling rendah adalah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,45% paling tinggi adalah Kota Pariaman sebesar 5,90%. Lalu pada tahun 2020 produk domestic bruto paling rendah adalah Kabupaten Padang Pariaman sebesar -10,46% paling tinggi adalah Kota Pasaman sebesar -0,87%. Selanjutnya pada tahun 2021 produk domestic bruto paling

rendah adalah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 2,18% paling tinggi adalah Kota Pasaman Barat sebesar 3,75%. Selanjutnya pada tahun 2022 produk domestik bruto paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 4,02% paling tinggi adalah Kota Padang Pariaman sebesar 6,87%.

Pengangguran merupakan individu ataupun sosok yang takbekerja ataupun tengah mencari pekerjaan. Pengangguran adalahrealitas yang negara berkembang serta negara maju hadapi. Secarageneral, pengangguran diartikan sebagai situasi di manamerekayang termasuk dalam kategori angkatan tidak memiliki pekerjaan.Tingginya tingkat kepedulian di suatu daerah akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu daerah.Pengangguran tidak hanya menjadi beban masyarakat akan tetapi menjadi beban bagi pemerintah, yang berdampak bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah pengangguran di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat dibawah ini:

Pada table 1.3 dibawah ini menunjukkan perkembangan jumlah pengangguran di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, pada tahun jumlah pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 2,31% paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 9,29%. Pada tahun 2019 jumlah pengangguran palingrendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 2,92% paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 8,74%. Lalu pada tahun 2020 jumlah pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 3,98% paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 13,64%. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 2,79% paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 13,37%.

Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 1,39% paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 11,69.

Tabel 1.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran
19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	2.31	2.92	3.98	2.79	1.39
Kab. Pesisir Selatan	6.03	6.02	7	5.97	4.61
Kab. Solok	6.12	4.72	4.65	4.67	5.89
Kab. Sijunjung	3.22	3.64	5.3	3.57	4.87
Kab. Tanah Datar	4.01	3.2	4.79	4.63	5.91
Kab. Padang Pariaman	7.03	6.08	8.13	8.41	6.6
Kab. Agam	4.93	4.78	4.61	5.06	4.93
Kab. Lima Puluh Kota	2.73	2.3	3.03	2.25	3.72
Kab. Pasaman	6.04	5.28	5.04	4.92	5.38
Kab. Solok Selatan	5.84	4.91	5.62	4.84	3.71
Kab. Dharmasraya	4.02	5.06	5.31	5	6.23
Kab. Pasaman Barat	3.36	4.74	4.69	5.02	6.33
Kota Padang	9.29	8.74	13.64	13.37	11.69
Kota Solok	6.03	7.06	8.35	5.15	3.9
Kota Sawahlunto	5.92	6.84	8.2	6.38	5
Kota Padang Panjang	5.35	4.38	7.22	4.9	4.84
Kota Bukittinggi	7.24	6.2	7.51	6.09	4.9
Kota Payakumbuh	3.95	4.13	6.68	6.47	5.16
Kota Pariaman	5.82	5.48	5.73	6.09	5.19
Provinsi Sumatera Barat	5.66	5.38	6.88	6.52	6.28

Sumber : Badan Pusat Statitisk 2023

Selanjutnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah kemiskinan, Seperti yang diungkapkan oleh Arsyad (2017) bahwa masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kemiskinan di 19 Kab./Kota Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Kemiskinan
19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Kemiskinan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	12.990	13.220	13.370	14.310	13.740
Kab. Pesisir Selatan	34.920	36.510	35.460	37.410	33.780
Kab. Solok	32.890	29.740	29.280	30.360	27.160
Kab. Sijunjung	16.550	16.650	16.280	16.810	15.070
Kab. Tanah Datar	18.480	16.200	15.340	15.890	14.910
Kab. Padang Pariaman	33.200	29.480	28.980	30.410	26.440
Kab. Agam	32.920	33.100	33.310	34.260	31.330
Kab. Lima Puluh Kota	26.470	26.640	26.430	28.510	26.000
Kab. Pasaman	20.310	20.220	20.290	21.570	19.940
Kab. Solok Selatan	11.850	12.490	12.390	13.410	11.810
Kab. Dharmasraya	15.420	15.490	15.700	17.600	15.080
Kab. Pasaman Barat	31.830	31.530	31.640	34.970	32.910
Kota Padang	44.040	42.440	42.170	48.440	42.370
Kota Solok	2.290	2.290	1.990	2.310	2.280
Kota Sawahlunto	1.480	1.350	1.360	1.520	1.470
Kota Padang Panjang	3.110	3.000	2.840	3.280	2.890
Kota Bukittinggi	6.320	6.000	6.010	6.980	6.160
Kota Payakumbuh	7.690	7.680	7.740	8.660	8.080
Kota Pariaman	4.400	4.200	3.660	3.990	3.800
Provinsi Sumatera Barat	357.130	348.220	344.230	370.670	335.210

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Pada table 1.4 dibawah ini menunjukkan perkembangan jumlah kemiskinan di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 jumlah kemiskinan paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.480 jiwa , paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 44.040 jiwa . Pada tahun 2019 jumlah kemiskinan paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.350 jiwa paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 42.440 jiwa. Lalu pada tahun 2020 jumlah kemiskinan paling rendah adalah

Kota Sawahlunto sebesar 1.360 jiwa paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 42.170 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kemiskinan paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.520 jiwa paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 48.440 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah kemiskinan paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.470 jiwa paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 42.370 jiwa.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Human Development Index. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah. Kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah.

Tabel 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 19 Kabupaten/Kota
Di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	60.28	61.26	61.09	61.35	62.19
Kab. Pesisir Selatan	69.4	70.08	69.9	70.03	70.84
Kab. Solok	68.6	69.08	69.08	69.24	70.02
Kab. Sijunjung	66.97	67.66	67.74	67.86	68.69
Kab. Tanah Datar	71.25	72.14	72.33	72.46	73.29
Kab. Padang Pariaman	69.71	70.59	70.61	70.76	71.63
Kab. Agam	71.7	72.37	72.46	72.57	73.29
Kab. Lima Puluh Kota	69.17	69.67	69.47	69.68	70.28
Kab. Pasaman	65.6	66.46	66.64	66.77	67.41
Kab. Solok Selatan	68.45	68.94	69.04	69.23	69.71
Kab. Dharmasraya	70.86	71.52	71.51	71.76	72.3
Kab. Pasaman Barat	67.43	68.21	68.49	68.76	69.57
Kota Padang	82.25	82.68	82.82	82.9	83.29
Kota Solok	77.89	78.38	78.29	78.41	79.23
Kota Sawahlunto	71.72	72.39	72.64	72.88	73.73
Kota Padang Panjang	77.3	78	77.93	77.97	78.78
Kota Bukittinggi	80.11	80.71	80.58	80.7	81.42
Kota Payakumbuh	78.23	78.95	78.9	79.08	79.53
Kota Pariaman	76.26	76.7	76.9	77.07	77.65
Provinsi Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26

Sumber : Badan Pusat Statitisk 2023

Pada table 1.4 diatas menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 60,28 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 82,25%. Pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 61,26 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 82,68%. Lalu pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 61,09 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 82,82%. Selanjutnya pada tahun 2021 indeks pembangunan manusia

paling rendah adalah Kabupaten Mentawai sebesar 61,35 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 82,9. Selanjutnya pada tahun 2022 Kabupaten Mentawai sebesar 62,19 paling tinggi adalah Kota Padang sebesar 83,29.

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas dapat diketahui bahwa kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. . Makadari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Jumlah Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di 19 Kab/Kota Di Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian penulis mengajukan sejumlah perumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh produk domestic regional bruoto terhadap ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat?
4. Bagaimana indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Distribusi Persentase produk domestic regional bruto terhadap ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis jumlah kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan dapat dijadikan sebagaibahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

Bagi Pemerintah, Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi yang berguna dalam pengambilan kebijakan strategis dibidang perekonomian secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

